

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM
UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Sударman M. Damiti, Lucyane Djaafar, Roni Lukum
Prodi PPKn, Jurusan Ilmu dan Kemasyarakatan, Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
e-mail: millandamiti14@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan program bantuan modal usaha di Desa Tulo'a, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Tulo'a. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan penerima bantuan, serta dokumentasi. Fokus penelitian mencakup tahapan implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah dirancang melalui musyawarah desa yang partisipatif dan menyentuh aspek penting seperti kriteria penerima, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pendampingan dan pelatihan bagi penerima, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Selain itu, sebagian masyarakat belum mampu mengelola bantuan usaha secara berkelanjutan sehingga berdampak pada tidak optimalnya hasil pemberdayaan. Maka meskipun secara administratif program telah diimplementasikan dengan baik, namun keberhasilan program dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Modal Usaha, Pemberdayaan Masyarakat.

ABSTRACT

This research was motivated by the importance of the village government's role in community empowerment by implementing a business capital assistance program policy in Tulo'a Village, Bone Bolango Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with the research conducted in Tulo'a Village. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials and aid recipients, and documentation. The research focused on the stages of policy implementation, the obstacles encountered, and the program's effectiveness in empowering the community. The findings indicate that the program implementation was designed through participatory village deliberations and addressed key aspects such as recipient criteria, budget allocation, and technical execution. However, the program's effectiveness is still hindered by several factors, including the lack of mentoring and training for recipients and the limited human resources within the village administration. Additionally, some community members are still unable to manage the business assistance sustainably, which affects the optimal outcomes of the empowerment efforts. Thus, although the program has been administratively implemented properly, its success in empowering the community has not been fully achieved.

Keywords: Policy Implementation, Business Capital, Community Empowerment.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit terkecil dalam administrasi negara, Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara urusan pemerintahan, desa memiliki tanggung jawab besar dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya. Kewenangan ini memungkinkan desa untuk menjadi motor penggerak pembangunan dari berbagai bidang tadi. Akan tetapi dalam memaksimalkan Pembangunan di berbagai bidang tersebut desa seringkali mengalami masalah. Salah satu strategi dalam memaksimalkan Pembangunan nasional melalui desa ialah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya penting untuk memberdayakan masyarakat yang mengalami ketidakmampuan baik dari faktor internal maupun eksternal. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berfokus pada pengembangan potensi masyarakat melalui peningkatan kesempatan, motivasi, dan kemampuan. Dengan demikian, masyarakat jadi mempunyai akses terkait sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil kendali atas masa depan mereka, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan komunitasnya (Endah 2020). Tujuan lain dari pemberdayaan masyarakat juga adalah merangkum nilai-nilai sosial dalam konsep pembangunan ekonomi, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Melalui pemberdayaan masyarakat, diharapkan masyarakat dapat mengaktifkan potensi yang dimilikinya, meningkatkan kemampuan dan kemandirian mereka, serta mencapai kesejahteraan yang lebih baik. Sebagai salah satu pilar kebijakan, pemberdayaan masyarakat berperan penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan mengaktifkan potensi sosial yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Dalam Upaya pemberdayaan Masyarakat, implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah desa merupakan bagian yang paling menentukan. Banyak program yang dapat dirancang oleh pemerintah desa yang kemudian akan diimplementasikan, implementasi kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang dan diformulasikan, Output dari pelaksanaan kebijakan meliputi tindakan, aktivitas, mekanisme, dan langkah-langkah yang disusun dalam suatu system (Ramdhani and Ramdhani, 2017). Pelaksanaan kebijakan adalah aktivitas terencana yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma yang disesuaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang disepakati. Menurut teori George C. Edward III dalam (Alhogbi 2017) Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Di Desa Tulo`a Kabupaten Bone Bolango, bentuk usaha meningkatkan pemberdayaan Masyarakat desa adalah melalui sektor ekonomi Masyarakat yaitu pemberian bantuan modal usaha, Program bantuan modal usaha pemberdayaan masyarakat desa dapat memfasilitasi penggunaan sumber daya alam lokal dengan cara mengubah hasil tambang menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah. Masalah yang sering dihadapi dalam pemberdayaan Masyarakat antara lain adalah kurangnya kemampuan memanfaatkan sumber daya alam dan tidak adanya modal usaha dalam mengaplikasikan pengolahan potensi sumber daya di desa. Dalam memulai sebuah usaha, modal merupakan faktor yang sangat penting. Modal ini contohnya adalah uang tunai atau suatu keahlian khusus. Modal barang dan uang biasanya digunakan untuk membeli inventaris, mengurus perizinan, dan sebagai modal kerja. Sementara itu, modal keahlian adalah kemampuan yang dimiliki individu untuk mengelola usaha tersebut. Tanpa modal yang memadai, baik berupa uang maupun keahlian, sebuah usaha tidak akan dapat berjalan dengan

lancar (Upaya et al. 2023). bantuan modal usaha dalam upaya pemberdayaan masyarakat merupakan program yang diimplementasikan oleh pemerintah desa Tulo'a yang berasal dari juknis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dengan program bantuan usaha modal tersebut pemerintah desa dapat membuat formulasi kebijakan hingga mengimplementasikan dalam bentuk program, implementasi program dilakukan setelah siklus formulasi kebijakan dilakukan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implementasi kebijakan program bantuan modal usaha dalam pemberdayaan masyarakat. Lokasi penelitian berada di Desa Tulo'a, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung di lapangan, wawancara mendalam dengan aparat desa dan masyarakat penerima bantuan, serta dokumentasi terhadap data dan arsip yang relevan. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data. Data diklasifikasikan menjadi data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, serta data sekunder yang berasal dari dokumen kebijakan, arsip desa, dan literatur terkait. Prosedur penelitian dimulai dengan tahap persiapan, yang mencakup identifikasi lokasi, penyusunan pedoman wawancara, dan pengurusan perizinan kepada pihak desa. Selanjutnya, pada tahap pelaksanaan, peneliti melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi secara langsung di lapangan. Setelah data terkumpul, tahap akhir dilakukan melalui proses pengolahan, analisis, dan penarikan kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga tahapan ini dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam terhadap pelaksanaan program bantuan modal usaha di masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2023 Pasal 2 ayat 1-3 tentang prioritas rincian prioritas penggunaan dana desa dikatakan bahwa, (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tulo'a, Marwan Damiti, program bantuan modal usaha yang dilaksanakan pada tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha di sektor pertanian, warung, produksi gula aren, dan minyak kelapa. Program ini dirancang melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, BPD, pihak kecamatan, dan perwakilan masyarakat. Hasil dari musyawarah ini meliputi tahapan penting seperti penentuan alokasi anggaran, kriteria penerima bantuan, serta mekanisme penyaluran dan monitoring program. Namun, tahapan pendampingan terhadap penerima bantuan tidak dimasukkan karena keterbatasan sumber daya manusia. Penyerahan bantuan dilaksanakan secara langsung di aula kantor desa dengan mengundang semua penerima yang telah terseleksi. Berdasarkan hasil seleksi, sebanyak 27 orang menerima bantuan dengan rincian 12 orang di sektor pertanian, 9 orang usaha warung, 4 orang pengrajin gula aren, dan 2 orang pembuatan minyak kelapa.

Pemerintah desa juga memastikan transparansi dalam proses ini dengan melibatkan anggota BPD dan masyarakat. Para penerima menyambut baik bantuan tersebut dan mengungkapkan bahwa materi bantuan disesuaikan dengan jenis usaha masing-masing, seperti bibit dan herbisida untuk petani, bahan pokok untuk pemilik warung, serta peralatan produksi untuk pengrajin. Namun dalam praktiknya, banyak penerima bantuan mengalami kesulitan dalam mengelola modal usaha yang diterima. Beberapa penerima, seperti Herlina Hamzati dan Hamza Pou, menyatakan bahwa kurangnya pengalaman dan ketiadaan pelatihan menjadi hambatan utama. Mereka mengaku kesulitan dalam mengatur stok barang, menentukan harga jual, dan mencatat pemasukan-pengeluaran. Akibatnya, sebagian usaha tidak berjalan lama dan barang bantuan bahkan sempat kedaluwarsa. Masyarakat berharap adanya pelatihan atau pendampingan dari pemerintah desa agar bisa mengelola usaha dengan lebih baik dan berkelanjutan.

Hasil monitoring pemerintah desa menunjukkan bahwa dari seluruh penerima bantuan, terdapat 9 usaha pertanian yang gagal panen dan 7 usaha warung yang tidak berjalan lancar. Aparat desa mengakui bahwa kurangnya pelatihan dan pendampingan turut menjadi faktor penyebab kegagalan tersebut. Faktor internal seperti kurangnya keseriusan, dedikasi, dan kemampuan teknis masyarakat, serta faktor eksternal seperti tidak adanya pelatihan dan ketidakpastian cuaca di sektor pertanian semakin memperburuk situasi. Pemerintah desa menyatakan akan memperbaiki hal ini ke depan dengan merancang pendampingan yang lebih terstruktur. Berdasarkan hasil temuan penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, peneliti menilai bahwa adanya kekurangan dalam upaya pemberdayaan Masyarakat di desa Tulo'a melalui program bantuan modal usaha yang diimplementasikan oleh pemerintah desa kepada Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hambatan internal maupun eksternal seperti, sebagai berikut: 1. Kurangnya kemampuan Masyarakat dalam mengelola modal usaha. 2. Tidak adanya pendampingan serta pelatihan untuk memadai kemampuan Masyarakat dalam mengelola modal usaha. 3. Kriteria usia produktif yang tidak diterapkan dalam seleksi calon penerima bantuan modal usaha.



Gambar 1. Observasi dan wawancara dengan masyarakat penerima bantuan

Pembahasan

Menurut teori George C. Edward III dalam (Alhogbi, 2017), formulasi kebijakan dipengaruhi beberapa aspek, yakni: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Hal tersebut jika dikaitkan dengan temuan di lapangan maka hubungan antara formulasi program dan implementasi program bantuan modal usaha di Desa Tulo'a terletak pada peran formulasi

sebagai dasar strategis dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Formulasi program yang baik mencakup penyusunan rencana yang matang, melibatkan identifikasi kebutuhan masyarakat, analisis potensi dampak, serta antisipasi terhadap berbagai kendala yang mungkin muncul.

Aspek pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang dibangun oleh pemerintah desa Tulo'a dalam formulasi program ini berupa sosialisasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, sosialisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu secara face to face atau mendatangi satu per satu masyarakat oleh kepala dusun untuk diberitahu mengenai program ini. Yang kedua adalah secara forum diskusi atau rapat terbuka yang diadakan di aula kantor desa. Sosialisasi ini melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah desa selaku pelaksana program, Badan Permusyawaratan Desa, serta masyarakat desa Tulo'a. Kegiatan ini mencerminkan model collaborative governance yang menekankan pentingnya koordinasi lintas aktor dalam kebijakan lokal (Nugroho & Suwarno, 2020).

Aspek yang kedua adalah sumber daya. Aspek sumber daya dalam teori tersebut meliputi sumber daya anggaran dan sumber daya manusia, baik sebagai pelaksana maupun penerima bantuan. Dalam hal sumber daya, anggaran yang digunakan pemerintah desa dalam program ini bersumber dari Dana Desa Tahun 2024. Pendanaan dari Dana Desa ini merupakan bagian dari strategi pemberdayaan masyarakat berbasis aset lokal, sebagaimana juga dibahas dalam pengelolaan BUMDes (Prayogo & Putra, 2020).

Aspek yang ketiga adalah disposisi. Dalam implementasi kebijakan, disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memainkan peran penting. Pelaksana kebijakan yang efektif tidak hanya memahami apa yang harus dilakukan, tetapi juga memiliki kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah desa sebagai pelaksana program sudah cukup baik dalam membangun komunikasi melalui sosialisasi program hingga seleksi yang menggunakan kriteria yang kuat. Namun, pada saat pelaksanaan, peneliti justru menemukan masalah pada sikap pelaksana program, yaitu pemerintah desa dalam hal ini aparat desa bagian kesejahteraan masyarakat kurang memberikan perhatian dalam pendampingan terhadap masyarakat dalam mengelola modal usaha yang diterima. Kondisi ini memperlihatkan adanya kelemahan pada birokrasi pelaksana, yang juga menjadi tantangan dalam reformasi pelayanan publik di Indonesia (Dwiyanto, Subarsono, & Warsono, 2018).

Modal, sumber daya penting bagi perusahaan, terdiri dari modal tetap (aset jangka panjang seperti bangunan dan mesin) dan modal kerja (aset sekali pakai seperti bahan mentah), keduanya dibutuhkan untuk membiayai kegiatan perusahaan (Azra, 2019). Modal usaha merupakan sumber daya finansial yang penting untuk mendukung berbagai keperluan operasional dan pengembangan bisnis (Wardani & Dewi, 2021). Syarifuddin menjelaskan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penyebab utama rendahnya kemampuan pengelolaan usaha. Sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan dalam berbagai kegiatan usaha, baik UMKM maupun usaha besar. Kondisi ini timbul akibat kurangnya pengetahuan dan pengalaman di sektor usaha yang bersangkutan (Syarifuddin & Mutia, 2019). Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan modal usaha oleh penerima bantuan di Desa Tulo'a kurang berjalan maksimal akibat keterbatasan kemampuan serta pengalaman dari penerima itu sendiri. Beberapa penerima tidak dibekali oleh pengetahuan yang cukup dalam mengelola modal usaha tersebut. Hal ini jelas membuat implementasi program ini kurang berjalan maksimal. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Basuki dan Rahmanto (2019) yang menyebutkan bahwa motivasi kewirausahaan dan keterampilan bisnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Di sisi lain, rendahnya literasi keuangan juga menjadi kendala umum dalam pengelolaan usaha (Fahmi & Suryani, 2021).

Menurut Tulus Wijanarko, faktor internal dalam konteks organisasi memiliki peran yang signifikan dalam menentukan keberhasilan individu maupun keseluruhan tim. Salah satu faktor penting adalah keterampilan dan kompetensi individu, yang mencakup kemampuan teknis dan non-teknis yang dimiliki oleh seseorang. Menurut Albert Bandura, faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan model perilaku yang diamati memengaruhi pembelajaran dan perilaku individu. Lingkungan eksternal menyediakan rangsangan dan umpan balik yang membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak. Hubungan antara faktor internal dan faktor penghambat implementasi program bantuan modal usaha di Desa Tulo'a sangat erat, karena faktor internal sering menjadi akar penyebab berbagai hambatan dalam pelaksanaan program. Faktor internal mencakup aspek yang berasal dari dalam sistem atau individu yang terlibat dalam program, seperti kapasitas penerima bantuan, kompetensi pelaksana program, dan mekanisme pengawasan. Ketika faktor internal ini tidak optimal, berbagai hambatan dapat muncul dalam implementasi program. Misalnya, jika penerima bantuan memiliki keterbatasan dalam hal keterampilan manajemen usaha atau pengelolaan keuangan, bantuan yang diberikan berisiko tidak digunakan secara efektif, sehingga tujuan program tidak tercapai. Hal ini memperkuat pentingnya modal sosial dalam mendukung keberhasilan UMKM, terutama dalam membangun resiliensi menghadapi tantangan (Suharjito & Somantri, 2018).

Faktor penghambat implementasi program bantuan modal usaha di Desa Tulo'a mencerminkan bagaimana kondisi atau faktor luar yang tidak dapat sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah desa atau penerima bantuan dapat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan program. Dalam implementasi program bantuan modal usaha di Desa Tulo'a, faktor eksternal yang menjadi masalah utama yang dihadapi adalah ketidakhadiran pendampingan atau pelatihan dari pemerintah desa. Tanpa arahan atau pelatihan yang memadai, penerima bantuan kesulitan dalam mengelola modal dan menjalankan usaha mereka dengan efektif, terutama bagi mereka yang belum memiliki pengalaman atau keterampilan dalam berwirausaha. Pentingnya pendampingan diperkuat oleh teori peningkatan mutu dan kualitas sumber daya yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan mutu dan kualitas sumber daya manusia, pendampingan biasanya digunakan oleh pemerintah dan lembaga non-profit. Hal ini dilakukan agar sumber daya manusia dapat mengidentifikasi masalah yang sedang dialami dan mencari solusi alternatif (Rizky, 2022).

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang berfokus pada pengembangan potensi masyarakat melalui peningkatan kesempatan, motivasi, dan kemampuan. Dengan demikian, masyarakat jadi mempunyai akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil kendali atas masa depan mereka, serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan komunitasnya (Endah, 2020). Menurut Sulistiyani, pemberdayaan bertujuan untuk menjadikan individu dan masyarakat mandiri, mampu berpikir, bertindak, dan mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang mandiri dapat memecahkan masalahnya sendiri dengan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang ada (Sarinah, Sihabudin, & Suwarlan, 2019). Tujuan utama pemberdayaan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang berdaya, yaitu masyarakat yang memiliki kekuatan atau kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara mandiri. Hal ini mencakup aspek fisik, ekonomi, dan sosial, seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan pendapat, memiliki sumber penghasilan, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan mandiri dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan (Hidayat & Warsono, 2020).

Kemandirian masyarakat merupakan kondisi yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif, serta penguasaan sumber daya yang

dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut (Sarinah et al., 2019). Berdasarkan teori tujuan pemberdayaan masyarakat di atas dapat dilihat beberapa aspek yang akan terpenuhi bila pemberdayaan masyarakat itu berhasil, yaitu: 1. Mandiri dalam berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. 2. Memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. 3. Melakukan sesuatu yang dipandang tepat untuk memecahkan masalah individu.

Namun dalam implementasinya, efektivitas program bantuan modal usaha dalam upaya pemberdayaan masyarakat ditemukan belum berjalan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang menjadi penghambat keberhasilan program tersebut. Salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefektifan program ini adalah kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi penerima bantuan. Bantuan modal usaha yang diberikan hanya dalam bentuk barang dagangan tanpa adanya pendampingan dalam manajemen usaha, strategi pemasaran, atau pengelolaan keuangan. Hal ini membuat penerima bantuan kesulitan dalam mengembangkan usahanya secara optimal. Bahkan, beberapa penerima hanya menjual barang yang diberikan tanpa adanya strategi bisnis yang jelas, sehingga modal usaha yang seharusnya berkembang menjadi kurang efektif. Hal ini ditegaskan oleh salah satu penerima bantuan, yang menyatakan bahwa ia hanya mencoba menjual barang yang diterima tanpa pemahaman mengenai cara mengatur stok, menentukan harga, atau menghitung keuntungan.

KESIMPULAN

Meskipun telah memenuhi prosedur perencanaan dan penyaluran bantuan dengan cukup baik, efektivitas program ini belum optimal dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Hambatan utama terletak pada kurangnya pendampingan dan pelatihan bagi penerima bantuan dalam mengelola usaha, serta rendahnya kemampuan manajerial sebagian penerima bantuan. Selain itu, kriteria seleksi penerima bantuan yang tidak mempertimbangkan aspek usia produktif dan kesiapan usaha turut memengaruhi keberhasilan program. Hasil monitoring menunjukkan bahwa banyak usaha tidak berkembang dengan baik, bahkan mengalami kegagalan. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan pemberdayaan yang sejati, diperlukan strategi lanjutan berupa pelatihan, pembinaan berkelanjutan, dan pengawasan yang lebih intensif agar masyarakat benar-benar mampu mandiri secara ekonomi dan sosial.

Pemerintah Desa kedepannya dapat mengimplementasikan pendekatan yang lebih komprehensif dalam program bantuan modal usaha, dengan memperhatikan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan program. Pemerintah desa perlu memberikan pelatihan kewirausahaan yang lebih intensif kepada penerima bantuan, termasuk pelatihan dalam manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran. Selain itu, pendampingan berkelanjutan dan pengawasan yang lebih ketat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan digunakan secara efektif dan sesuai tujuan. Selain itu penerima bantuan dapat lebih serius dalam memanfaatkan bantuan yang telah diberikan dengan meningkatkan keterampilan dalam mengelola usaha, baik dalam aspek manajemen usaha maupun pengelolaan keuangan. Penerima bantuan perlu proaktif mencari pelatihan atau pendampingan yang dapat memperkaya pengetahuan dan keterampilan mereka, serta mengoptimalkan penggunaan modal untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhogbi, B. G. (2017). BAB II Landasan Teori A. Kebijakan Publik. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 21–25. [http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/2796/3/BAB%20II.pdf)
- Azra, A. T. (2019). Analisis Pengaruh Modal Usaha Lama Usaha Dan Jenis Usaha Terhadap Laba Usaha Mustahik Studi Pada UMKM Binaan Baznas Kota Malang. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 7(2), 5. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/5602/4921>
- Basuki, A. T., & Rahmanto, Y. E. (2019). The Effect of Entrepreneurial Motivation and Business Skills on the Performance of Micro and Small Enterprises in Yogyakarta, Indonesia. *Journal of Entrepreneurship Education*, 22(S1), 1–14. <https://www.google.com/search?q=https://www.abacademies.org/articles/the-effect-of-entrepreneurial-motivation-and-business-skills-on-the-performance-of-micro-and-small-enterprises-in-yogyakarta-indonesia-8386.html>
- Dwiyanto, A., Subarsono, A. G., & Warsono, H. (2018). Bureaucratic Reform and Public Service Improvement in Indonesia: Challenges and Strategies. *Asian Education and Development Studies*, 7(1), 78–92. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1108/AEDS-07-2017-0081>
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135–143. <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>
- Fahmi, F., & Suryani, S. (2021). The Impact of Financial Literacy on the Performance of Small and Medium Enterprises in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 1185–1193. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no3.1185>
- Hidayat, F. A., & Warsono, H. (2020). Mekanisme Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Delta Mulia Di Desa Panempan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 27–38. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.189>
- Iin Sarinah, Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Pangandaran. *Jurnal MODERAT*, 5(3), 267–277.
- Mokodompit, M., Syarifuddin, & Mutia, S. (2019). Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *JFRES: Journal of Fiscal and Regional Economy Studies*, 2(1), 87–92. <https://doi.org/10.36883/jfres.v2i1.26>
- Nugroho, R., & Suwarno, B. (2020). Collaborative Governance in the Implementation of Village Fund Program in Indonesia. *Journal of Public Administration and Governance*, 10(1), 13–27. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.5296/jpag.v10i1.16433>
- Prayogo, U., & Putra, A. H. P. K. (2020). Community Empowerment Through Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Indonesia: A Literature Review. *Journal of Rural Development and Agribusiness*, 17(2), 105–116. <https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.21735/jrda.v17i2.687>
- Rizky, F. M. (20AD). Pengaruh Bantuan Modal Usaha, Pelatihan Dan Pendampingan Terhadap Perkembangan Usaha Pada Umkm Binaan Baznas Kota Tangerang Selatan. Andrew's Disease of the Skin Clinical Dermatology. Upaya, Terhadap, Peningkatan Pendapatan, Pelaku Usaha Kuliner, and Muhammad Irawan.

Online Journal System: <https://jurnalp4i.com/index.php/knowledge>

Efektivitas Bantuan Modal Usaha, 3(1), 194–213.
<http://dx.doi.org/10.59509/jmi.v3i3>

Suharjito, S., & Somantri, G. R. (2018). The Role of Social Capital in Strengthening the Resilience of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Indonesia. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 149–165.
<https://www.google.com/search?q=https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2016-0230>

Wardani, N. T., & Dewi, R. M. (2021). Pengaruh Motivasi, Kreativitas, Inovasi Dan Modal Usaha Terhadap Minat Berwirausaha. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 9(1), 93. <https://doi.org/10.26905/jmdk.v9i1.5806>